

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Purworejo

Halaman 12

Dampak Kekeringan Meluas

PURWOREJO - Dampak kekeringan atau kesulitan air bersih akibat musim kemarau di wilayah Kabupaten Purworejo semakin meluas. Sejumlah desa yang tidak masuk dalam daftar desa terdampak mulai mengajukan permohonan bantuan dropping air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Purworejo, Hery Susanto mengungkapkan, Kabupaten Purworejo telah menetapkan status darurat kekeringan atau kekurangan air bersih dengan surat keputusan (SK) Bupati tertanggal 28 Juni lalu.

Penetapan itu didasarkan pada hasil rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi, instansi terkait, rapat internal BPBD kabupaten, rapat dengan para camat dan kepala desa yang sering terdampak, rapat tim kaji bencana serta praktisi BMKG.

SK tersebut ditindaklanjuti dengan penjadwalan dropping air mulai 5 Juli, meliputi 56 desa di 11 kecamatan. Meski demikian, hingga pertengahan Agustus ini dampak kekeringan semakin

meluas. Sejumlah desa yang tidak masuk dalam daftar karena tahun-tahun sebelumnya tidak terdampak, kini mulai terdampak dan mengajukan bantuan dropping air bersih serta penampungan air.

"Perkembangan yang ada, dari 11 kecamatan dan 56 desa terdampak, ada beberapa desa tambahan yang tidak masuk dalam daftar itu, tapi tetap kami layani," ungkap Hery, kemarin.

Sejumlah desa tambahan yang mengajukan bantuan air bersih tersebut di antaranya Desa Jatiwangsan Kecamatan Kemiri, Sucen Juru Tengah Kecamatan Bayan, dan Desa Polowangi Kecamatan Pituruh. Selain permohonan bantuan air bersih, warga di Desa Jatiwangsan juga mengajukan bantuan penampungan air bersih. Be-

berapa desa lain juga mengajukan bantuan tandon penampungan air yakni Desa Kalirejo Kecamatan Bagelen dan Desa Cengka-wakrejo Kecamatan Banyuurip.

"Permohonan ada yang meminta tandon. Dari beberapa desa yang meminta bisa kami penuhi dengan alternatif berupa terpal seperti Jatiwangsan dan Bener. Sedangkan yang Cengkawak dan Kalirejo belum ada respons lagi dari mereka (mau atau tidak diberikan terpal)," tuturnya.

■ Lebih Luas

Menurut Hery, dibanding 2017 lalu, dampak kekeringan tahun ini memang lebih luas atau terjadi peningkatan daerah terdampak. Pada 2017 jumlah desa terdampak sebanyak 51 desa di 10 kecamatan. "Ada beberapa daerah yang 2017 tidak terdampak di 2018 ini terdampak," katanya.

Hery menambahkan, untuk penanganan kekeringan, setiap tahun BPBD rutin mengajukan anggaran pada APBD kabupaten. Tahun ini dialokasikan anggaran untuk pengadaan air bersih Rp 68.799.000 untuk stok 1.420 tangki

(kapasitas tangki masing-masing 5.000 meter kubik). "Insya Allah cukup, sesuai dengan SK status darurat dimulai awal Juli sampai akhir Oktober selama 4 bulan. Kalau tidak cukup kami mohonkan bantuan ke BPBD Provinsi. PMI juga melakukan bantuan dropping air bersih dengan pengaturan jadwal berkoordinasi dengan kami dengan satu tangki," imbuhnya.

Hery menambahkan, untuk pelaksanaan dropping air bersih, BPBD Purworejo memiliki dua unit mobil tangki. Selain itu juga mengajukan bantuan penggunaan dua tangki aset eks Bakorwil yang kini salah satunya sudah bisa digunakan. "Sehingga sudah tiga mobil tangki, harapannya yang satu lagi bisa segera beroperasi sehingga bisa empat mobil tangki," imbuhnya.

Berdasarkan data BPBD Purworejo, sesuai SK darurat kekeringan, jumlah warga terdampak sebanyak 25.283 jiwa (7.184 KK) di 56 desa/kelurahan pada 11 kecamatan. Hingga awal pekan ini setidaknya dropping air bersih telah dilakukan sebanyak 212 tangki. ■ SMN/H87-ad